

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
AJI LINARDI
NIM. E42010069

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : Ajilindari.al@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Ternak Sapi Kepada Masyarakat Di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi pada Program bantuan ternak sapi yang belum berjalan secara efektif dan masih belum optimal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Pegawai Kantor Camat Simpang Hilir serta Kelompok Tani Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dalam Program bantuan ternak sapi belum efektif dan sesuai prosedur. Harus adanya perbaikan dari berbagai dimensi antara lain pembagian hewan ternak yang tepat sasaran, kpengawasan dari pemerintah harus ditingkatkan. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain adanya perwakilan dari pemerintah untuk mengawasi berjalannya program bantuan ternak sapi.

Kata-kata Kunci : Program, Implementasi dan Tepat Sasaran.

Implementation Assistance Program Cattle Community In Simpang Hilir Regency North Kayong

Abstract

This thesis is intended to describe and analyze Implementation Assistance Program Cattle Community In Simpang Hilir Regency North Kayong. The title of this thesis was appointed by the identification of phenomena occurring problems associated with the implementation of the aid program of cattle that have not run effectively and still not optimal.

This study used a descriptive research with qualitative methods. Subjects in this study is the staff of Department of Agriculture and Livestock, and Simpang Downstream Officer Head Office and Farmers Group Simpang Hilir Regency North Kayong. The conclusion of this study indicate that the implementation of the aid program has not been effective cattle and appropriate procedures. Should the improvement of various dimensions, among others, the distribution of livestock were on target, kpengawasan of government should be improved. To that end, the recommendations given, among others, the presence of representatives of the government to oversee the passage of cattle assistance program

Keywords : Program, Implementation and Right Target

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Kayong Utara yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan program pembagian hewan ternak kepada masyarakat sejak tahun 2010. Untuk mensukseskan program pembagian hewan ternak kepada masyarakat, suatu komoditi harus didasarkan kepada potensi wilayah dan kualitas dari ternak tersebut, program pembagian hewan ternak yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus diimbangi oleh potensi wilayah tempat program tersebut berlangsung dan memiliki kualitas dan bibit unggul guna menunjang program tersebut akan terus berlanjut.

Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara mengadakan program bantuan ternak sapi kepada masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Produksi Peternakan untuk melaksanakan program bantuan ternak sapi. Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara membentuk unit manajemen program swasembada daging sapi. Bantuan sapi tersebut dibagikan kepada kelompok tani dalam satu kelompok tani terdiri dari 10 sampai 25 orang. Kelompok tani tersebut yang mengembangkan dan memelihara

sapi tersebut guna tercukupinya pasokan daging sapi di Kabupaten Kayong Utara.

Langkah awal yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara ialah dengan melakukan sosialisasi operasional pencapaian target swasembada daging sapi kepada aparatur terkait, asosiasi dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kayong Utara agar implementasi bantuan ternak sapi tersebut dapat sukses dan berdampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Kayong Utara jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2012 memiliki jumlah penduduk sebesar 125.987 dengan ratio laki-laki adalah 64.990 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 60.997 jiwa dengan proyeksi penduduk sebesar 125.987 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Simpang Hilir yaitu 38.354 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Kepulauan Karimata yaitu 3.047 jiwa.

Riand Nugroho mengemukakan implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Riand Nugroho mengajukan ada “empat tepat” yang dilihat dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Yang menjadi “empat tepat”

tersebut ialah (1) Tepat Keefektifan, (2) Tepat Pelaksanaan, (3) Tepat Target, (3) Tepat Lingkungan

Berdasarkan data terakhir tingkat capaian produksi sapi potong mengalami peningkatan yang signifikan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2011 terealisasi sebesar 31.200 Kg dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 21.485 Kg. Produksi sapi potong tersebut meningkat 45,22% peningkatan tersebut dikarenakan semakin banyaknya permintaan masyarakat terhadap daging sapi Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara mengadakan program bantuan ternak sapi kepada masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Produksi Peternakan untuk melaksanakan program bantuan ternak sapi. Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara membentuk unit manajemen program swasembada daging sapi. Bantuan sapi tersebut dibagikan kepada kelompok tani dalam satu kelompok tani terdiri dari 10 sampai 25 orang. Kelompok tani tersebut yang mengembangkan dan memelihara sapi tersebut guna tercukupinya pasokan daging sapi di Kabupaten Kayong Utara.

Langkah awal yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara ialah dengan melakukan sosialisasi operasional pencapaian target swasembada

daging sapi kepada aparaturnya terkait, asosiasi dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kayong Utara agar implementasi bantuan ternak sapi tersebut dapat sukses dan berdampak positif bagi masyarakat.

Program bantuan ternak sapi ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan daging dan terciptanya pemerataan pasokan daging sapi di Kabupaten Kayong Utara. Namun, dengan terjadinya beberapa permasalahan dalam implementasi bantuan ternak sapi tentunya tujuan utama pemerintah tadi tidak akan terwujud, sehingga perlunya penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengapa dan faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya hal tersebut terutama dalam pelaksanaan program swasembada daging sapi dengan mengangkat judul “Implementasi Program Bantuan Ternak Sapi Kepada Masyarakat di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara”

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah dan agar penelitian ini lebih terarah maka yang menjadi rumusan masalah pokok yang ada dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Ternak Sapi Kepada Kelompok Tani di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara ?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan ternak sapi yang ada di Kabupaten Kayong Utara khususnya di Kecamatan Simpang Hilir
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program swasembada daging sapi di Kabupaten Kayong Utara khususnya di Kecamatan Simpang Hilir.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, manfaat yang diberikan peneliti adalah untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya pada aspek implementasi kebijakan dalam suatu program yang dijalankan.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara khususnya pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan program swasembada daging sapi dan hewan

ternak khususnya di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (atau kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi operasional, maupun melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan Winarno, (1989: 65) .

1. Tepat Keefektivan

- a) Apakah Kebijakan Tersebut Sudah tepat

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan ketepatan kebijakan yang menjadi faktor utama apakah kebijakan tersebut dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat

- b) Perumusan kebijakan yang sesuai dengan masalah

Dalam perumusan kebijakan tersebut, harus mengerti akan sasaran yang akan dituju atau diselesaikan. Kemampuan dari kebijakan tersebut memecahkan permasalahan yang ada

- c) Kewenangan lembaga dalam pembuatan kebijakan

Kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang dan dalam pembuatan kebijakan tersebut apakah sesuai dengan karakter kebijakan

2. Tepat Pelaksanaan

Pada pelaksanaan kebijakan tersebut ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana yaitu pemerintah, pemerintah-masyarakat, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Dalam kaitannya dengan pembagian hewan ternak ini sebaiknya adanya saling kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan tersebut.

3. Tepat Target

Tepat target berkenaan dengan tiga hal yaitu apakah target yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan apakah kebijakan tersebut tidak ada ketimpangan terhadap kebijakan lain, selanjutnya kesiapan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dan yang terakhir apakah kebijakan tersebut baru

dibuat atau memperbaharui implementasi kebijakan yang sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Ketepatan pemilihan lingkungan menjadi faktor berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho, dalam implementasi suatu kebijakan harus bersifat efektif dalam pelaksanaannya dan target yang akan diberikan bantuan harus tepat sasaran dan memperhatikan lingkungan implementasi kebijakan tersebut.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan Metode Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Lokasi penelitian ialah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara dan Kecamatan Simpang Hilir. Subjek penelitian ialah : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan; Kabag Peternakan; Camat Kecamatan Simpang Hilir; Kelompok tani.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tepat Keefektifan

Tepat keefektifan merupakan faktor pertama yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan termasuk implementasi aturan karena untuk mengukur tercapainya suatu kebijakan dan berdampak terhadap masyarakat. Proses inilah yang harus memerlukan formulasi kebijakan yang baik agar permasalahan yang ada di masyarakat dapat terpecahkan, jika tepat keefektifan tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi *kegagalan program* yang tentunya akan menyebabkan banyak hal yang tidak sesuai aturan atau tidak diinginkan. Agar implementasi bantuan ternak sapi di Kecamatan Simpang Hilir dapat tercapai, implementor harus memahami apa saja yang harus dilakukan agar tepat keefektifan dapat terlaksana dengan baik, Riant Nugroho (2003) membagi tepat keefektifan kedalam tiga unsur yaitu apakah kebijakan tersebut sudah tepat, perumusan kebijakan yang sesuai dengan masalah, kewenangan lembaga dalam membuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan dengan apa yang diperoleh dari hasil wawancara pada Kabag Peternakan bahwa dalam menentukan sasaran dari kebijakan tersebut kelompok tani harus mengajukan

proposal bantuan ternak dan belum tentu juga proposal yang diajukan oleh kelompok tani tersebut dapat diterima oleh pemerintah

2. Tepat Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan suatu program atau implementasi suatu kebijakan bisa saja sudah memiliki tujuan yang jelas. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik ditujukan agar tujuan kebijakan publik yang dikeluarkan dapat segera tercapai dengan dampak negatif yang sekecil mungkin. Dalam pelaksanaan suatu program atau implementasi suatu kebijakan bisa saja sudah memiliki tujuan yang jelas, namun masih terdapat faktor-faktor lain yang berperan penting didalam pelaksanaan program tersebut.

Tepat Pelaksanaan Riant Nugroho (2003) mengemukakan kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan bersama dengan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus mengelola atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri industri berkala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan program bantuan ternak sapi di Kecamatan Simpang Hilir, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara memiliki

rencana program dan kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Program peningkatan produksi peternakan
2. Program peningkatan teknologi peternakan
3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
5. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Penulis menyimpulkan bila tepat pelaksanaan pada Implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana secara efektif. Dari koordinasi antara Dinas dan Kelompok Tani belum menemukan sinkronisasi. Masih banyak kelompok tani mengeluhkan kurangnya pengawasan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara terhadap pelaksanaan bantuan ternak sapi dan masih kurang pemahamannya kelompok tani dalam pemeliharaan sapi yang ideal. Hal tersebut dapat dilihat dari susahnyanya Kelompok Tani tersebut mengembang biakan sapi yang telah diberikan oleh pemerintah.

3. Tepat Target

Secara teoritis, menurut Riant Nugroho, tepat target berkenaan dengan tiga hal yaitu:

1. Apakah target yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan apakah kebijakan tersebut tidak ada ketimpangan terhadap kebijakan lain;
2. Bagaimana kesiapan dalam melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Apakah kebijakan tersebut baru dibuat atau memperbaharui implementasi kebijakan yang sebelumnya.

Ketepatan target merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Target yang diintervensi harus sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya supaya tidak terdapat tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Tanpa adanya target dalam suatu implementasi kebijakan maka dalam penerapannya di lapangan akan dibingungkan dengan tujuan dari implementasi tersebut. Prinsip tepat target implementasi bantuan ternak sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara untuk mensejahterakan rakyat dan bantuan ternak sapi tersebut dapat berkelanjutan. Untuk mencapai target tersebut harus didukung dengan pelaksanaan yang baik agar target peningkatan produksi sapi yang ada di Kabupaten Kayong Utara secara umum dapat meningkat dan dapat mensejahterakan rakyat. tepat target pada

program bantuan ternak sapi di Kecamatan Simpang Hilir sudah cukup baik, hal ini dilihat dari kesuksesan kelompok tani dalam pemeliharaan hewan ternak akan tetapi masih perlu adanya penyetaraan antara kelompok tani di daerah satu dengan lainnya supaya target yang diusung oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menuai hasil yang memuaskan.

4. Tepat Lingkungan

Riant Nugroho (2003) berpendapat bahwa lingkungan kebijakan adalah interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga strategis dalam masyarakat. Pada dasarnya lingkungan suatu kebijakan merupakan faktor yang dinamis yang merupakan salah satu unsur dari sistem kebijakan publik yang berperan dalam proses suatu kebijakan. Tujuan utama kebijakan adalah agar masyarakat miskin yang tidak mampu bisa mendapatkan pelayanan yang baik bukan untuk dibeda-bedakan hanya karena status sosial dan ekonomi saja. Sebagai pelaksana penting mengetahui tujuan utama dari terbentuknya kebijakan bukan hanya sekedar menjalankan tugas sehingga pelaksana akan mampu mengambil keputusan yang tepat apabila dihadapkan pada kasus-kasus tersebut.

SIMPULAN

Empat tepat tersebut penulis gunakan untuk menganalisis sehingga penelitian yang berjudul implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara disimpulkan sebagai berikut:

1. Tepat keefektifan merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan untuk melihat berhasil atau tidaknya implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Penulis menarik kesimpulan bahwa tepat keefektifan yang terdapat dalam implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara masih kurang terutama dari segi kesinkronisan antara pemerintah dan masing masing kelompok tani. Ketidaktahuan kelompok tani dalam pemeliharaan hewan ternak dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada dinas menjadi keefektifan implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara masih belum efektif
2. Tepat pelaksanaan program merupakan faktor kedua yang harus diperhatikan untuk melihat kesuksesan implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Dalam pelaksanaan

implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara penulis melihat masih kurangnya pengawasan yang diberikan oleh pemerintah. Masih perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok tani yang berada di Kecamatan Simpang Hilir khususnya.

3. Tepat Target merupakan faktor selanjutnya didalam melihat implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Target yang diusung oleh pemerintah sejatinya telah terlaksana terhadap kelompok tani di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Hanya perlu adanya trobosan baru terhadap kelanjutan dari implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara

4. Tepat Lingkungan pada dasarnya lingkungan suatu kebijakan merupakan faktor yang dinamis yang merupakan salah satu unsur dari sistem kebijakan publik yang berperan dalam proses suatu kebijakan. Lingkungan yang berada di Kecamatan Simpang Hilir sejatinya dapat menunjang pelaksanaan program bantuan ternak sapi khususnya di Kecamatan Simpang Hilir. dengan wilayah yang masih luas akan tanah hijau menjadikan lingkungan di

Kecamatan Simpang Hilir berpotensi dalam upaya pelaksanaan program bantuan ternak sapi di Kecamatan Simpang Hilir

Keempat faktor diatas masing-masing memiliki peran dan memberikan kontribusi yang berbeda-beda implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Faktor-faktor tersebut harus selalu diperhatikan didalam pelaksanaannya, mekanisme pengawasan harus dijalankan agar dalam pelaksanaannya program ini benar-benar efektif dan mencapai tujuan. Efektifitas kebijakan juga akan semakin terbentuk apabila terdapat hubungan yang baik antara kelompok tani dan pemerintah.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan setelah penulis mengambil kesimpulan tentang masalah yang dihadapi terhadap implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan tepat keefektifan dalam perumusan kebijakan menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang

Hilir Kabupaten Kayong Utara. Diharapkan pemerintah dapat mengkaji lebih dalam permasalahan permasalahan dalam implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan.

2. Tepat pelaksanaan implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dapat lebih ditingkatkan dengan menambah fasilitas untuk Kelompok tani berupa bibit pangan sapi yang berkualitas dan bantuan suntik hamil kepada sapi yang telah diberikan kepada kelompok tani.
3. Tepat Target yang di usung oleh pemerintah penulis lihat sudah cukup baik, hanya saja masih perlu adanya perbaikan dari sektor pengembang biakan hewan ternak yang telah diberikan kepada kelompok tani agar dapat mensejahterakan masyarakat khususnya kelompok tani yang ada di Kecamatan Simpang Hilir.
4. Lingkungan yang berada di Kecamatan Simpang Hilir sudah cukup menunjang implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Masih banyaknya lahan hijau

dan tanah kosong dapat dimanfaatkan guna kelancaran implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Akan tetapi yang masih kurangnya pemanfaatan lingkungan oleh kelompok tani menjadi faktor penghambat pelaksanaan implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Apeldoorn, van. 2004. *Pengantar ilmu hokum*. Jakarta: Pt. Pradnya Paramita
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Fisip Untan. 2013. *Pedoman penulisan skripsi program studi ilmu pemerintahan*. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan
- Kusnadi, Moh Dan Saragih, Bintang R. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut System Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pt Gramedia.
- Milez, M. B. Dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI-Press
- Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik (Public Policy) menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Midi Pustaka.

Nugroho, Riant. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK formulasi, implementasi, evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Surjadi, A. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit Alumni

Wahab, Abdul . 2008. *Analisis kebijaksanaan : dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi aksara

Widodo, joko. 2007. *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia

Winarto, Budi. 2012. *Kebijakan Public Teori, Proses Dan Study Kasus*. Yogyakarta: Caps

Peraturan :

Peraturan Menteri Pertanian Tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi tahun 2014

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014

Surat Keputusan Bupati Kayong Utara Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pusat Pembibitan Sapi Potong Di Kabupaten Kayong Utara

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara

Website:

<http://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>

<http://chano21.blogspot.com/2012/05/definisi-implementasi-kebijakan-publik.html>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : AJI LINARDI
NIM / Periode lulus : E42010069/ 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : Ajilindari.al@gmail.com /08988270711

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA.
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 14 Juli 2015

(AJI LINARDI)